



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka pengaturan mengenai kodifikasi akun seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah, baik dalam rangka penyusunan dokumen anggaran maupun penyajian laporan keuangan, perlu disusun dalam bentuk format terstruktur dengan menggunakan Bagan Akun Standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bagan Akun Standar pada Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
11. Basis AkruaI adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan Akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Entitas Pelaporan yang bersangkutan.
14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
15. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

16. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai Aset, utang dan Ekuitas dana pada tanggal tertentu.
18. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
19. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
20. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
21. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
22. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
23. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
25. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban.
26. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

27. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
28. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
29. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah.
30. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara Akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan Entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
31. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
32. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
33. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
34. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
35. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pengguna laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, transparan, akuntabel dan auditabel.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memenuhi:
- a. kebutuhan kodifikasi dalam penyusunan dokumen anggaran;
 - b. kebutuhan kodifikasi dalam penatausahaan keuangan, yang dilakukan baik secara manual maupun menggunakan fasilitas teknologi informasi; dan
 - c. kebutuhan kodifikasi dalam penyajian dokumen penyusunan laporan keuangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan BAS, yang meliputi:
 1. Umum;
 2. BAS dalam Dokumen Anggaran;
 3. BAS dalam Penatausahaan Keuangan; dan
 4. BAS dalam Penyajian Laporan Keuangan.
- b. Penerapan Kode Akun dalam Laporan Keuangan, yang meliputi:
 1. Kode Akun;
 2. Kode Akun Neraca dalam Laporan Neraca;
 3. Kode Akun LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan
 4. Kode Akun LO dalam Laporan Operasional.
- c. Kodifikasi BAS;
- d. Pembinaan dan Pengendalian;
- e. Ketentuan Peralihan; dan
- f. Ketentuan Penutup.

BAB IV PENYUSUNAN BAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) BAS disusun dalam bentuk serangkaian kode-kode dalam bentuk susunan angka yang dirangkai secara terstruktur, yang meliputi kode akun (*chart of account*), kelompok, jenis obyek dan rincian obyek untuk mendefinisikan secara sederhana atas seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi yang dilaksanakan di setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Ekonomi dalam lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) level, yang meliputi:

- a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
- b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
- e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

Bagian Kedua
BAS dalam Dokumen Anggaran

Pasal 5

- (1) Kodefikasi dalam BAS untuk penyusunan dokumen anggaran didasarkan pada kebijakan Akuntansi Basis Kas.
- (2) Susunan kodefikasi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
BAS dalam Penatausahaan Keuangan

Pasal 6

- (1) Kodefikasi dalam BAS untuk penatausahaan keuangan merupakan media dalam melakukan identifikasi atas transaksi dan/atau kejadian ekonomi yang dilakukan di setiap Entitas Akuntansi maupun Entitas Pelaporan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penggunaan kodefikasi seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan, dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan menggunakan fasilitasi teknologi informasi.

Bagian Keempat
BAS dalam Penyajian Laporan Keuangan

Pasal 7

- (1) Kodefikasi dalam BAS untuk penyajian laporan keuangan menggunakan kode-kode akun dengan berpedoman kepada BAS untuk level 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang disusun untuk memenuhi kebutuhan penyajian laporan keuangan, yang meliputi:
 - a. penyajian Laporan Neraca yang memuat akun Neraca;
 - b. penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang memuat akun Pendapatan LRA, Belanja dan Pembiayaan; dan
 - c. penyajian LO yang memuat akun Pendapatan-LO dan Beban.
- (2) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode akun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENERAPAN KODE AKUN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Kode Akun

Pasal 8

- (1) Kodefikasi akun untuk penyusunan laporan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterapkan untuk:
 - b. pengakuan transaksi;
 - c. penilaian transaksi;
 - d. penyajian transaksi;
 - e. pengungkapan transaksi; dan/atau
 - f. kejadian ekonomi.
- (3) Kodefikasi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pembentuk setiap jenis laporan keuangan setelah melalui tindakan identifikasi, pencatatan dan pengungkapannya berdasarkan SAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi Neraca, laporan realisasi anggaran dan LO yang dilaksanakan oleh setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Kodefikasi akun sebagai dasar pembentuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Akun 1 (satu) diberi kode angka 1 (satu) untuk menunjukkan akun Aset;
 - b. Akun 2 (dua) diberi kode angka 2 (dua) untuk menunjukkan akun Kewajiban;
 - c. Akun 3 (tiga) diberi kode angka 3 (tiga) untuk menunjukkan akun Ekuitas;
 - d. Akun 4 (empat) diberi kode angka 4 (empat) untuk menunjukkan akun Pendapatan-LRA;
 - e. Akun 5 (lima) diberi kode angka 5 (lima) untuk menunjukkan akun Belanja;
 - f. Akun 6 (enam) diberi kode angka 6 (enam) untuk menunjukkan akun Transfer;
 - g. Akun 7 (tujuh) diberi kode angka 7 (tujuh) untuk menunjukkan akun Pembiayaan;
 - h. Akun 8 (satu) diberi kode angka 8 (delapan) untuk menunjukkan akun Pendapatan-LO; dan
 - i. Akun 9 (sembilan) diberi kode angka 9 (sembilan) untuk menunjukkan akun Beban.

Bagian Kedua
Kode Akun Neraca dalam Laporan Neraca

Pasal 9

- (1) Laporan Neraca disusun melalui proses identifikasi, pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam pengelolaan keuangan yang dibentuk dari akun Neraca, yang meliputi:
 - a. akun Aset;
 - b. akun Kewajiban; dan
 - c. akun Ekuitas.
- (2) Akun Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas seluruh sumber daya yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- (3) Akun Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas Kewajiban/hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
- (4) Akun Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan.

Pasal 10

- (1) Kode akun Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
1.0.0.00.00	ASET
1.1.0.00.00	ASET LANCAR
1.1.1.00.00	Kas
1.1.2.00.00	Investasi Jangka Pendek
1.1.3.00.00	Piutang Pendapatan
1.1.4.00.00	Piutang Lainnya
1.1.5.00.00	Penyisihan Piutang
1.1.6.00.00	Beban Dibayar Dimuka
1.1.7.00.00	Persediaan

1.1.8.00.00	Aset Untuk Dikonsolidasikan
1.2.0.00.00	INVESTASI JANGKA PANJANG
1.2.1.00.00	Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1.2.2.00.00	Investasi Jangka Panjang Permanen
1.3.0.00.00	ASET TETAP
1.3.1.00.00	Tanah
1.3.2.00.00	Gedung dan Bangunan
1.3.3.00.00	Peralatan dan Mesin
1.3.4.00.00	Jalan, Irigasi dan Jaringan
1.3.5.00.00	Aset Tetap Lainnya
1.3.6.00.00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.7.00.00	Akumulasi Penyusutan
1.4.0.00.00	DANA CADANGAN
1.4.1.00.00	Dana Cadangan
1.5.0.00.00	ASET LAINNYA
1.5.1.00.00	Tagihan Jangka Panjang
1.5.2.00.00	Kemitraan Dengan Pihak Ke Tiga
1.5.3.00.00	Aset Tidak Berwujud
1.5.4.00.00	Aset Lain-lain

- (2) Kode akun Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
2.0.0.00.00	KEWAJIBAN
2.1.0.00.00	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1.00.00	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2.1.2.00.00	Utang Bunga
2.1.3.00.00	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.4.00.00	Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.5.00.00	Utang Beban
2.1.6.00.00	Utang Jangka Pendek lainnya
2.2.0.00.00	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2.2.1.00.00	Utang Dalam Negeri
2.2.2.00.00	Utang Jangka Panjang Lainnya

- (3) Kode akun Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
3.0.0.00.00	EKUITAS
3.1.0.00.00	Ekuitas
3.1.1.00.00	Ekuitas
3.1.2.00.00	Ekuitas SAL
3.1.3.00.00	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Bagian Ketiga
Kode Akun LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 11

- (1) Laporan Realisasi Anggaran disusun melalui proses identifikasi, pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam pengelolaan keuangan yang dibentuk dari akun LRA, yang meliputi:
 - a. Akun Pendapatan-LRA;
 - b. Akun Belanja;
 - c. Akun Transfer; dan
 - d. Akun Pembiayaan.
- (2) Akun Pendapatan-LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Akun Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Akun Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih, dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah dan bersifat transitoris atau bukan berasal dari bagian dari kewenangan otonomi penuh Pemerintah Daerah dan/atau bersifat pendanaan kegiatan operasional sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya, maupun pendanaan kegiatan sinergitas pembangunan di Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (5) Akun Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Kode akun Pendapatan-LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
4.0.0.00.00	PENDAPATAN-LRA
4.1.0.00.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA
4.1.1.00.00	Pendapatan Pajak Daerah-LRA
4.1.2.00.00	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
4.1.3.00.00	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA
4.1.4.00.00	Lain-lain PAD Yang Sah-LRA
4.2.1.00.00	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN-LRA
4.2.2.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA
4.2.3.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA
4.2.4.00.00	Bantuan Keuangan-LRA
4.3.0.00.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA
4.3.1.00.00	Pendapatan Hibah-LRA
4.3.2.00.00	Dana Darurat-LRA
4.3.3.00.00	Pendapatan Lainnya-LRA

- (2) Kode akun Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
5.0.0.00.00	BELANJA
5.1.0.00.00	BELANJA OPERASI
5.1.1.00.00	Belanja Pegawai
5.1.2.00.00	Belanja Barang dan Jasa
5.1.3.00.00	Belanja Bunga
5.1.4.00.00	Belanja Subsidi
5.1.5.00.00	Belanja Hibah
5.1.6.00.00	Belanja Bantuan Sosial
5.2.0.00.00	BELANJA MODAL
5.2.1.00.00	Belanja Modal Tanah
5.2.2.00.00	Belanja Modal Peralatan Mesin
5.2.3.00.00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.4.00.00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.2.3.00.00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

- (3) Kode akun Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
6.0.0.00.00	TRANSFER
6.1.0.00.00	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
6.1.1.00.00	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
6.1.2.00.00	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6.2.0.00.00	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6.2.1.00.00	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya

6.2.2.00.00	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.3.00.00	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6.2.4.00.00	Transfer Dana Otonomi Khusus

- (4) Kode akun Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
7.0.0.00.00	PEMBIAYAAN
7.1.0.00.00	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7.1.1.00.00	Penggunaan SILPA
7.1.2.00.00	Pencairan Dana Cadangan
7.1.3.00.00	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
7.1.4.00.00	Pinjaman Dalam Negeri
7.1.5.00.00	Penerimaan Kembali Piutang
7.1.6.00.00	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen lainnya
7.1.7.00.00	Pinjaman Luar Negeri
7.1.8.00.00	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7.2.0.00.00	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7.2.1.00.00	Pembentukan Dana Cadangan
7.2.2.00.00	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah
7.2.3.00.00	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
7.2.4.00.00	Pemberian Pinjaman Daerah
7.2.5.00.00	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
7.2.6.00.00	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7.2.7.00.00	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

Bagian Keempat
Kode Akun LO dalam Laporan Operasional
Pasal 13

- (1) Laporan Operasional disusun melalui proses identifikasi, pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam pengelolaan keuangan yang dibentuk dari akun LO, yang meliputi:
 - a. Akun Pendapatan-LO; dan
 - b. Akun Beban.
- (2) Akun Pendapatan-LO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan atau kejadian ekonomi atas seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang disajikan serta disandingkan dengan periode sebelumnya.
- (3) Akun Beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban.

Pasal 14

- (1) Kode akun Pendapatan-LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
8.0.0.00.00	PENDAPATAN-LO
8.1.0.00.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO
8.1.1.00.00	Pendapatan Pajak Daerah-LO
8.1.2.00.00	Pendapatan Retribusi Daerah-LO
8.1.3.00.00	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO
8.1.4.00.00	Lain-lain PAD Yang Sah-LO
8.2.0.00.00	PENDAPATAN TRANSFER-LO
8.2.1.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
8.2.2.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
8.2.3.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO
8.2.4.00.00	Bantuan Keuangan-LO
8.3.0.00.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO
8.3.1.00.00	Pendapatan Hibah-LO
8.3.2.00.00	Dana Darurat-LO
8.3.3.00.00	Pendapatan Lainnya-LO
8.4.0.00.00	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO
8.4.1.00.00	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
8.4.2.00.00	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8.4.3.00.00	Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya-LO
8.5.0.00.00	PENDAPATAN LUAR BIASA-LO
8.5.1.00.00	Pendapatan Luar Biasa-LO

- (2) Kode-kode akun Beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
9.0.0.00.00	BEBAN
9.1.0.00.00	BEBAN OPERASI-LO
9.1.1.00.00	Beban Pegawai-LO
9.1.2.00.00	Beban Barang dan Jasa-LO
9.1.3.00.00	Beban Bunga-LO
9.1.4.00.00	Beban Subsidi-LO
9.1.5.00.00	Beban Hibah-LO
9.1.6.00.00	Beban Bantuan Sosial-LO
9.1.7.00.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi
9.1.8.00.00	Beban Penyisihan Piutang
9.1.9.00.00	Beban Lain-lain

Pasal 15

- (1) Selain akun beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) perlu dilakukan penambahan kode-kode akun beban berupa akun beban lainnya untuk menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, berupa pengeluaran uang atau Kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas Pelaporan kepada suatu Entitas Pelaporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kode-kode akun Beban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjukkan transaksi dan/atau kejadian ekonomi yang akan berakibat pada penurunan Ekuitas dari suatu Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. Akun Beban Lainnya Transfer-LO;
 - b. Akun Beban Lainnya Non Operasional; dan
 - c. Akun Beban Lainnya Luar Biasa.

Pasal 16

- (1) Kode-kode akun Beban Lainnya Transfer-LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
9.2.0.00.00	BEBAN TRANSFER
9.2.1.00.00	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9.2.2.00.00	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9.2.3.00.00	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
9.2.5.00.00	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

- (2) Kode-kode akun Beban Lainnya Non Operasional -LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
9.3.0.00.00	DEFISIT NON OPERASIONAL
9.3.1.00.00	Defisit Penjualan Aset Non Lancar- LO
9.3.2.00.00	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9.3.3.00.00	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

- (3) Kode-kode akun Beban Lainnya Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c, meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
9.4.0.00.00	Beban Luar Biasa
9.4.1.00.00	Beban Luar Biasa

BAB VI
KODEFIKASI BAS

Pasal 17

Kodefikasi BAS yang meliputi kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) SKPKD melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan BAS kepada SKPD.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi, supervise, bimbingan teknis dan/atau asistensi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Hal-hal lain berkenaan pengaturan, prosedur penyusunan dan penyelenggaraan BAS selain dilakukan untuk tujuan penyajian dokumen anggaran dan penyajian laporan keuangan sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Walikota ini, terlebih dahulu dilakukan penyesuaian terhadap semua akun untuk mewujudkan kesesuaian proses penganggaran, penatausahaan dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkenaan dengan adanya perbedaan perlakuan basis Akuntansi yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

BAS sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, mulai diberlakukan untuk penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2015.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 November 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 238

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
BAGAN AKUN STANDAR
PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

KODEFIKASI BAS DALAM PENGANGGARAN

A. KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KODE ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHAN			KODE ORGANISASI	
1.		URUSAN WAJIB		
1.	01	Pendidikan		
			1.01.02	Dinas Pendidikan
1.	02	Kesehatan		
			1.02.01	Dinas Kesehatan
			1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo
			1.02.06	Rumah Sakit Umum Daerah Khusus Ibu dan Anak Dewi Sartika
1.	03	Pekerjaan Umum		
			1.03.06	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
			1.03.07	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
1.	06	Perencanaan Pembangunan		
			1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.	07	Perhubungan		
			1.07.02	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.	08	Lingkungan Hidup		
			1.08.05	Kantor Lingkungan Hidup
1.	10	Kependudukan dan Catatan Sipil		
			1.10.02	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		

KODE URUSAN PEMERINTAHAN			KODE ORGANISASI	
			1.12.02	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.	13	Sosial		
			1.13.02	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1.13.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.	15	Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah		
			1.15.02	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1.	16	Penanaman Modal		
			1.16.02	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
1.	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
			1.19.04	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			1.19.05	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
			1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			1.20.03	Sekretariat Daerah
			1.20.04	Sekretariat DPRD
			1.20.09	Kantor Kecamatan Kawalu
			1.20.11	Kantor Kecamatan Tamansari
			1.20.12	Kantor Kecamatan Mangkubumi
			1.20.13	Kantor Kecamatan Cibeureum
			1.20.14	Kantor Kecamatan Indihiang
			1.20.15	Kantor Kecamatan Cihideung
			1.20.16	Kantor Kecamatan Tawang
			1.20.17	Kantor Kecamatan Cipedes
			1.20.18	Kantor Kecamatan Purbaratu

KODE URUSAN PEMERINTAHAN			KODE ORGANISASI	
			1.20.19	Kantor Kecamatan Bungursari
			1.20.20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah
			1.20.21	Badan Kepegawaian Daerah
			1.20.22	Inspektorat
			1.20.23	Dinas Pendapatan Daerah
			1.20.24	Sekretariat Dewan KORPRI
1.	24	Kearsipan		
			1.24.02	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
2.		URUSAN PILIHAN		
2.	01	Pertanian		
			2.01.05	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan yang saat ini menangani urusan pekerjaan umum, urusan perumahan dan urusan penataan ruang, maka pengkodeannya sebagai berikut:

Kode Urusan	Kode Organisasi	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Akun	Kode Kelompok	Kode Jenis	Kode Obyek	Kode Rincian Obyek
1.03	1.03.02	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX
1.04	1.03.02	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX
1.05	1.03.02	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX

Cara membaca pengkodean tersebut:

a. Pengkodean Urusan :

- 1) Urusan pekerjaan umum (Kode 1.03)
- 2) urusan perumahan (Kode 1.04)
- 3) urusan penataan ruang (Kode 1.05)

b. Pengkodean OPD Pelaksana Urusan:

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan (Kode 1.03.02).

2. Dinas Kebudayaan, selain menangani urusan kebudayaan juga menangani urusan pariwisata, pengkodeannya sebagai berikut:

Kode urusan	Kode Organisasi	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Akun	Kode Kelompok	Kode Jenis	Kode Obyek	Kode Rincian Obyek
1.17	1.17.01	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX
1.18	1.17.01	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX
2.04	1.17.01	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX

Cara membaca pengkodean:

a. Pengkodean Urusan:

- 1) Urusan kebudayaan (Kode 1.17),
- 2) urusan pemuda dan olahraga (Kode 1.18)
- 3) urusan pariwisata (Kode 2.04)

b. Pengkodean OPD Pelaksana Urusan:

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Kode 1.17.01).

B. KODE RENCANA KERJA ANGGARAN

KODE	NAMA FORMULIR
RKA-SKPD	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 1	Rincian Rencana Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 2.1	Rincian Rencana Kerja Anggaran Belanja Operasi Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 2.2	Rekapitulasi Rincian Rencana Kerja Anggaran Belanja Operasi menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 2.2.1	Rincian Rencana Kerja Anggaran Belanja Belanja Operasi menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPKD 3.1	Rincian Rencana Kerja Anggaran Penerimaan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPKD 3.2	Rincian Rencana Kerja Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
BAGAN AKUN STANDAR
PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

KODE AKUN DALAM BAGAN AKUN STANDAR

A. Kodering Pendapatan dalam Dokumen Anggaran

KODE AKUN					URAIAN
1					2
5	6	7	8	9	
4					PENDAPATAN -
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	1	1			Pendapatan Pajak Daerah
4	1	1	01		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	1	01	01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan
4	1	1	01	02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep
4	1	1	01	03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus
4	1	1	01	04	PKB - Mobil Bus - Microbus
4	1	1	01	05	PKB - Mobil Bus - Bus
4	1	1	01	06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up
4	1	1	01	07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck
4	1	1	01	08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck
4	1	1	01	09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	1	01	10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
4	1	1	01	11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	1	01	12	dst
4	1	1	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	1	02	01	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan
4	1	1	02	02	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep
4	1	1	02	03	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus
4	1	1	02	04	BBNKB -Mobil Bus - Microbus
4	1	1	02	05	BBNKB -Mobil Bus - Bus
4	1	1	02	06	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up
4	1	1	02	07	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck
4	1	1	02	08	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck
4	1	1	02	09	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2
4	1	1	02	10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
4	1	1	02	11	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	1	02	12	dst
4	1	1	03		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	1	1	03	01	Pajak Bahan Bakar Premium
4	1	1	03	02	Pajak Bahan Bakar Pertamina
4	1	1	03	03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus
4	1	1	03	04	Pajak Bahan Bakar Solar
4	1	1	03	05	Pajak Bahan Bakar Gas
4	1	1	03	06	dst
4	1	1	04		Pajak Air Permukaan
4	1	1	04	01	Pajak Air Permukaan
4	1	1	05		Pajak Rokok
4	1	1	05	01	Pajak Rokok

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	1	06		Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Hotel
4	1	1	06	01	Hotel
4	1	1	06	02	Motel
4	1	1	06	03	Losmen
4	1	1	06	04	Gubuk Pariwisata
4	1	1	06	05	Wisma Pariwisata - Batu Apung
4	1	1	06	06	Pesanggrahan
4	1	1	06	07	Rumah Penginapan dan sejenisnya
4	1	1	06	08	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
4	1	1	06	09	dst
4	1	1	07		Pajak Restoran
4	1	1	07	01	Restoran
4	1	1	07	02	Rumah Makan
4	1	1	07	03	Kafetaria
4	1	1	07	04	Kantin
4	1	1	07	05	Warung
4	1	1	07	06	Bar
4	1	1	07	07	Jasa Boga/ Katering
4	1	1	07	08	dst
4	1	1	08		Pajak Hiburan
4	1	1	08	01	Tontonan Film/Bioskop
4	1	1	08	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4	1	1	08	03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya
4	1	1	08	04	Pameran
4	1	1	08	05	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya
4	1	1	08	06	Sirkus/Akrobat/Sulap
4	1	1	08	07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	1	08	08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan
4	1	1	08	09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center)
4	1	1	08	10	Pertandingan Olahraga
4	1	1	08	11	dst
4	1	1	09		Pajak Reklame
4	1	1	09	01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
4	1	1	09	02	Reklame Kain
4	1	1	09	03	Reklame Melekat/Stiker
4	1	1	09	04	Reklame Selebaran
4	1	1	09	05	Reklame Berjalan
4	1	1	09	06	Reklame Udara
4	1	1	09	07	Reklame Apung
4	1	1	09	08	Reklame Suara
4	1	1	09	09	Reklame Film/Slide
4	1	1	09	10	Reklame Peragaan
4	1	1	09	11	dst
4	1	1	10		Pajak Penerangan Jalan
4	1	1	10	01	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri
4	1	1	10	02	Pajak Penerangan Jalan sumber lain
4	1	1	11		Pajak Parkir
4	1	1	11	01	Pajak Parkir
4	1	1	12		Pajak Air Tanah
4	1	1	12	01	Pajak Air Tanah
4	1	1	13		Pajak Sarang Burung Walet
4	1	1	13	01	Pajak Sarang Burung Walet
4	1	1	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	1	14	01	Asbes

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	1	14	02	Batu Tulis
4	1	1	14	03	Batu setengah permata
4	1	1	14	04	Batu Kapur
4	1	1	14	05	Batu Apung
4	1	1	14	06	Batu Permata
4	1	1	14	07	Bentonit
4	1	1	14	08	Dolomit
4	1	1	14	09	Feldspar
4	1	1	14	10	Garam Batu (Halite)
4	1	1	14	11	Grafit
4	1	1	14	12	Granit/Andesit
4	1	1	14	13	Gips
4	1	1	14	14	Kalsit
4	1	1	14	15	Kaolin
4	1	1	14	16	Leusit
4	1	1	14	17	Magnesit
4	1	1	14	18	Mika
4	1	1	14	19	Marmar
4	1	1	14	20	Nitrat
4	1	1	14	21	Opsidien
4	1	1	14	22	Oker
4	1	1	14	23	Pasir dan kerikil
4	1	1	14	24	Pasir Kuarsa
4	1	1	14	25	Perlit
4	1	1	14	26	Phospat
4	1	1	14	27	Talk
4	1	1	14	28	Tanah Serap (Fullers earth)

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	1	14	29	Tanah Diatome
4	1	1	14	30	Tanah Liat
4	1	1	14	31	Tawas (Alum)
4	1	1	14	32	Tras
4	1	1	14	33	Yarosif
4	1	1	14	34	Zeolit
4	1	1	14	35	Basal
4	1	1	14	36	Trakit
4	1	1	14	37	Mineral bukan logam dan lainnya
4	1	1	15		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4	1	1	15	01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4	1	1	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4	1	1	16	01	BPHTB - Pemindehan Hak
4	1	1	16	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru
4	1	1	17		dst...
4	1	1	17	01	dst...
4	1	2			Pendapatan Retribusi Daerah
4	1	2	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	2	01	01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas
4	1	2	01	02	Puskesmas keliling
4	1	2	01	03	Puskesmas pembantu
4	1	2	01	04	Balai Pengobatan
4	1	2	01	05	Rumah Sakit Umum Daerah
4	1	2	01	06	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda
4	1	2	01	07	dst...
4	1	2	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4	1	2	02	01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	2	02	02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
4	1	2	02	03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah
4	1	2	03		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4	1	2	03	01	Kartu Tanda Penduduk
4	1	2	03	02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal
4	1	2	03	03	Kartu Identitas Kerja
4	1	2	03	04	Kartu Penduduk Sementara
4	1	2	03	05	Kartu Identitas Penduduk Musiman
4	1	2	03	06	Kartu Keluarga
4	1	2	03	07	Akta Catatan Sipil
4	1	2	04		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	2	04	01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman
4	1	2	04	02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
4	1	2	05		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	2	05	01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	2	06		Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	2	06	01	Pelataran
4	1	2	06	02	Los
4	1	2	06	03	Kios
4	1	2	07		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	2	07	01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan
4	1	2	07	02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep
4	1	2	07	03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus
4	1	2	07	04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus
4	1	2	07	05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus
4	1	2	07	06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up
4	1	2	07	07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	2	07	08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck
4	1	2	07	09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2
4	1	2	07	10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
4	1	2	07	11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	2	07	12	dst
4	1	2	08		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	2	08	01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
4	1	2	08	02	Alat Penanggulangan Kebakaran
4	1	2	08	03	Alat Penyelamatan Jiwa
4	1	2	08	04	dst
4	1	2	09		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	2	09	01	Penyediaan Peta Dasar (Garis)
4	1	2	09	02	Penyediaan Peta Foto
4	1	2	09	03	Penyediaan Peta Digital
4	1	2	09	04	Penyediaan Peta Tematik
4	1	2	09	05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
4	1	2	10		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	2	10	01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	2	11		Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	2	11		Rumah Tangga
4	1	2	11		Perkantoran
4	1	2	11		Industri
4	1	2	12		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	2	12	01	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
4	1	2	12	02	Pengujian dalam keadaan terbungkus
4	1	2	13		Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	2	13	01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	2	13	02	Pelatihan Teknis
4	1	2	14		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	2	14	01	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi
4	1	2	15		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	2	15	01	Penyewaan Tanah dan Bangunan
4	1	2	15	02	Laboratorium
4	1	2	15	03	Ruangan
4	1	2	15	04	Kendaraan Bermotor
4	1	2	16		Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
4	1	2	16	01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang
4	1	2	16	02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
4	1	2	16	03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	17		Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	2	17	01	Pelelangan Ikan
4	1	2	17	02	Pelelangan Ternak
4	1	2	17	03	Pelelangan Hasil Bumi
4	1	2	17	04	Pelelangan Hasil Hutan
4	1	2	17	05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan
4	1	2	18		Retribusi Terminal
4	1	2	18	01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
4	1	2	18	02	Tempat Kegiatan Usaha
4	1	2	18	03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
4	1	2	19		Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	2	19	01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir
4	1	2	20		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
4	1	2	20	01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
4	1	2	21		Retribusi Rumah Potong Hewan

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	2	21	01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong
4	1	2	21	02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong
4	1	2	21	03	Pelayanan Pemotongan Hewan
4	1	2	21	04	Pelayanan Penampungan Hewan
4	1	2	21	05	Pelayanan Fasilitas Penjajaan Hewan
4	1	2	21	06	dst...
4	1	2	22		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	2	22	01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan
4	1	2	23		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
4	1	2	23	01	Pelayanan Tempat Rekreasi
4	1	2	23	02	Pelayanan Tempat Pariwisata
4	1	2	23	03	Pelayanan Tempat Olahraga
4	1	2	24		Retribusi Penyeberangan Air
4	1	2	24	01	Pelayanan Penyeberangan Orang
4	1	2	24	02	Pelayanan Penyeberangan Barang
4	1	2	25		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	2	25	01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah
4	1	2	26		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	2	26	01	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
4	1	2	27		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	2	27	01	Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	2	28		Retribusi Izin Gangguan
4	1	2	28	01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi
4	1	2	28	02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan
4	1	2	29		Retribusi Izin Trayek
4	1	2	29	01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi
4	1	2	29	02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	2	30		Retribusi Izin Perikanan
4	1	2	30	01	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi
4	1	2	30	02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan
4	1	2	31		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	2	31	01	Penggunaan ruas jalan tertentu
4	1	2	31	02	Penggunaan koridor tertentu
4	1	2	31	03	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang
4	1	2	32		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4	1	2	32	01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
4	1	3			Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4	1	3	01		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4	1	3	01	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD
4	1	3	01	02	dst
4	1	3	02		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN
4	1	3	02	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN
4	1	3	02	02	dst
4	1	3	03		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	3	03	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	3	03	02	dst
4	1	4			Lain-lain PAD Yang Sah
4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4	1	4	01	01	Hasil Penjualan Tanah
4	1	4	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4	1	4	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4	1	4	01	04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
4	1	4	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
4	1	4	02		Hasil Penjualan Aset Lainnya

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	4	02	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya
4	1	4	03		Penerimaan Jasa Giro
4	1	4	03	01	Jasa Giro Kas Daerah
4	1	4	03	02	Jasa Giro Bendahara
4	1	4	03	03	Jasa Giro Dana Cadangan
4	1	4	03	04	dst
4	1	4	04		Pendapatan Bunga
4	1	4	04	01	Pendapatan Bunga Deposito
4	1	4	04	02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir
4	1	4	04	03	dst
4	1	4	05		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4	1	4	05	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
4	1	4	05	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
4	1	4	06		Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4	1	4	06	01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah
4	1	4	06	02	Penerimaan Potongan dari.....
4	1	4	06	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari.....
4	1	4	06	04	dst
4	1	4	07		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	07	02	dst
4	1	4	08		Pendapatan Denda Pajak
4	1	4	08	01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4	1	4	08	03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	1	4	08	04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4	1	4	08	05	Pendapatan Denda Pajak Rokok

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	4	08	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	4	08	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4	1	4	08	08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4	1	4	08	09	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4	1	4	08	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4	1	4	08	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	4	08	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4	1	4	08	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4	1	4	08	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	4	08	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4	1	4	08	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4	1	4	09		Pendapatan Denda Retribusi
4	1	4	09	01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	4	09	02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4	1	4	09	03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4	1	4	09	04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	4	09	05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	4	09	06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	4	09	07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	4	09	08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	4	09	09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	4	09	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	4	09	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	4	09	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	4	09	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	4	09	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	4	09	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	4	09	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
4	1	4	09	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	4	09	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal
4	1	4	09	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	4	09	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
4	1	4	09	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	4	09	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4	1	4	09	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
4	1	4	09	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air
4	1	4	09	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	4	09	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	4	09	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	4	09	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan
4	1	4	09	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek
4	1	4	09	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan
4	1	4	09	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	4	09	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4	1	4	10		Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah
4	1	4	10	01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah
4	1	4	10	02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah
4	1	4	10	03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah
4	1	4	10	04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna
4	1	4	11		Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
4	1	4	11	01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
4	1	4	11	02	dst
4	1	4	12		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4	1	4	12	01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	4	12	02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4	1	4	12	03	dst
4	1	4	13		Pendapatan dari Pengembalian
4	1	4	13	01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	4	13	02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
4	1	4	13	03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	4	13	04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4	1	4	13	05	dst
4	1	4	14		Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat
4	1	4	14	01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah
4	1	4	14	02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat
4	1	4	14	03	dst
4	1	4	15		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4	1	4	15	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
4	1	4	15	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
4	1	4	15	03	dst
4	1	4	16		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
4	1	4	16	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa
4	1	4	16	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan
4	1	4	16	03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah
4	1	4	16	04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna
4	1	4	17		Pendapatan Zakat*
4	1	4	17	01	Pendapatan Zakat*
4	1	4	18		Pendapatan BLUD
4	1	4	18	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
4	1	4	18	02	Pendapatan Hibah BLUD
4	1	4	18	03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	1	4	18	04	dst
4	1	4	19		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
4	1	4	19	01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
4	1	4	20		Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional- Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN-FKTP)
4	1	4	20	01	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN-FKTP)
4	2				PENDAPATAN TRANSFER
4	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
4	2	1	01		Bagi Hasil Pajak
4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
4	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan
4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan
4	2	1	01	04	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
4	2	1	01	05	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau
4	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)
4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4	2	1	03		Dana Alokasi Umum (DAU)
4	2	1	03	01	Dana Alokasi Umum
4	2	1	04		Dana Alokasi Khusus (DAK)

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	2	1	04	01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan
4	2	1	04	02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
4	2	1	04	03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
4	2	1	04	04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
4	2	1	04	05	DAK Bidang Keluarga Berencana
4	2	1	04	06	DAK Bidang Kehutanan
4	2	1	04	07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4	2	1	04	08	DAK Bidang Kesehatan
4	2	1	04	09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
4	2	1	04	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan
4	2	1	04	11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan
4	2	1	04	12	DAK Bidang Perdagangan
4	2	1	04	13	DAK Bidang Lingkungan Hidup
4	2	1	04	14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT)
4	2	1	04	15	DAK Bidang Pertanian
4	2	1	04	16	DAK Bidang Energi Pedesaan
4	2	1	04	17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
4	2	1	04	18	DAK Bidang Pendidikan
4	2	1	04	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
4	2	1	04	20	dst
4	2	2			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
4	2	2	01		Dana Otonomi Khusus
4	2	2	01	01	Dana Otonomi Khusus
4	2	2	01	02	Dana Tambahan Infrastruktur
4	2	2	02		Dana Keistimewaan
4	2	2	02	01	Dana Keistimewaan
4	2	2	03		Dana Penyesuaian

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	2	2	03	01	Tunjangan Profesi Guru PNSD
4	2	2	03	02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4	2	2	03	03	Dana Insentif Daerah
4	2	2	03	04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi
4	2	2	03	05	Bantuan Operasional Sekolah
4	2	2	03	06	dst
4	2	3			Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
4	2	3	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4	2	3	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4	2	3	01	02	dst
4	2	3	02		Pendapatan Bagi hasil Lainnya
4	2	3	02	01	Pendapatan Bagi hasil Lainnya
4	2	3	02	02	dst
4	2	3	03		Pendapatan Dana Otonomi Khusus
4	2	3	03	01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus
4	2	4			Bantuan Keuangan
4	2	4	01		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya
4	2	4	01	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi
4	2	4	01	02	dst
4	2	4	02		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
4	2	4	02	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
4	2	4	02	02	dst
4	2	4	03		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota
4	2	4	03	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota
4	2	4	03	02	dst
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4	3	1			Pendapatan Hibah

KODE AKUN					URAIAN
1					2
4	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4	3	1	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4	3	1	02		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	1	02	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya -
4	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri
4	3	1	03	01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri
4	3	1	03	02	dst
4	3	1	04		Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
4	3	1	04	01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat
4	3	1	04	02	Pendapatan Hibah dari perorangan
4	3	2			Dana Darurat
4	3	2	01		Dana Darurat
4	3	2	01	01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4	3	2	01	02	dst
4	3	3			Pendapatan Lainnya
4	3	3	01		Pendapatan Lainnya
4	3	3	01	01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga
4	3	3	01	b	dst

B. Koding Belanja dalam Dokumen Anggaran

KODE AKUN					URAIAN
1					2
5	6	7	8	9	
5	1				BELANJA OPERASI
5	1	1			BELANJA PEGAWAI

5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan
5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga
5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan
5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional
5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum
5	1	1	01	06	Tunjangan Beras
5	1	1	01	07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus
5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji
5	1	1	01	09	Iuran Jaminan Kesehatan
5	1	1	01	10	Uang Paket
5	1	1	01	11	Tunjangan Badan Musyawarah
5	1	1	01	12	Tunjangan Komisi
5	1	1	01	13	Tunjangan Badan Anggaran
5	1	1	01	14	Tunjangan Badan Kehormatan
5	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan
5	1	1	01	17	Uang Duka Wafat / Tewas
5	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian
5	1	1	01	20	Tunjangan Kesehatan DPRD
5	1	1	01	21	Tunjangan Badan Legislasi DPRD
5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
5	1	1	02	03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
5	1	1	02	05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
5	1	1	02	07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tunjangan Profesi Guru PNSD
5	1	1	02	08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD/CPNSD

5	1	1	03		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
5	1	1	03	01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	03	02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5	1	1	03	03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	04		Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5	1	1	04	01	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5	1	1	04	02	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
5	1	1	04	03	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
5	1	1	05		Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	05	06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel
5	1	1	05	07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran
5	1	1	05	08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan
5	1	1	05	09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame
5	1	1	05	10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan
5	1	1	05	11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir
5	1	1	05	12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah
5	1	1	05	13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet
5	1	1	05	14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	1	05	15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
5	1	1	05	16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan
5	1	1	06	02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5	1	1	06	03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
5	1	1	06	04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5	1	1	06	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5	1	1	06	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar
5	1	1	06	07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor
5	1	1	06	08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	1	1	06	09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta

5	1	1	06	10		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus</i>
5	1	1	06	11		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair</i>
5	1	1	06	12		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang</i>
5	1	1	06	13		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan</i>
5	1	1	06	14		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi</i>
5	1	1	06	15		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah</i>
5	1	1	06	16		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan</i>
5	1	1	06	17		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan</i>
5	1	1	06	18		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal</i>
5	1	1	06	19		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir</i>
5	1	1	06	20		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa</i>
5	1	1	06	21		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan</i>
5	1	1	06	22		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan</i>
5	1	1	06	23		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga-LRA</i>
5	1	1	06	24		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyeberangan Air</i>
5	1	1	06	25		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah</i>
5	1	1	06	26		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan</i>
5	1	1	06	27		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</i>
5	1	1	06	28		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan</i>
5	1	1	06	29		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek</i>
5	1	1	06	30		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan</i>
5	1	1	06	31		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas</i>
5	1	1	06	32		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)</i>
5	1	1	07			Uang Lembur
5	1	1	07	01		<i>Uang Lembur PNS</i>
5	1	1	07	02		<i>Uang Lembur Non PNS</i>
5	1	2				Belanja Barang dan Jasa
5	1	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis
5	1	2	01	01		<i>Belanja alat tulis kantor</i>
5	1	2	01	02		<i>Belanja dokumen/administrasi tender</i>

5	1	2	01	03	<i>Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)</i>
5	1	2	01	04	<i>Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya</i>
5	1	2	01	05	<i>Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih</i>
5	1	2	01	06	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</i>
5	1	2	01	07	<i>Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran</i>
5	1	2	01	08	<i>Belanja pengisian tabung gas</i>
5	1	2	01	09	<i>Belanja Dekorasi dan Desain</i>
5	1	2	01	10	<i>Belanja Dokumentasi</i>
5	1	2	01	11	<i>Belanja Cinderamata</i>
5	1	2	01	12	<i>Belanja Tropy</i>
5	1	2	01	13	<i>Belanja Plakat / Pandel</i>
5	1	2	01	14	<i>Belanja Pengisian Freon AC</i>
5	1	2	01	15	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
5	1	2	01	16	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga</i>
5	1	2	01	17	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pertanian</i>
5	1	2	01	18	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Industri</i>
5	1	2	01	19	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Meubelair</i>
5	1	2	01	20	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Medis</i>
5	1	2	01	21	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Alat Olahraga</i>
5	1	2	01	22	<i>Belanja Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan</i>
5	1	2	01	23	<i>Belanja Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan</i>
5	1	2	01	24	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Ketanagalistrikan</i>
5	1	2	01	25	<i>Belanja Sarana Penanganan Bencana</i>
5	1	2	01	26	<i>Belanja Prasarana Penanganan Bencana</i>
5	1	2	02		<i>Belanja Bahan/Material</i>
5	1	2	02	01	<i>Belanja bahan baku bangunan</i>
5	1	2	02	02	<i>Belanja bahan/bibit tanaman</i>
5	1	2	02	03	<i>Belanja bibit ternak</i>
5	1	2	02	04	<i>Belanja bahan obat-obatan</i>
5	1	2	02	05	<i>Belanja bahan kimia</i>

5	1	2	02	06		<i>Belanja Persediaan Makanan Pokok</i>
5	1	2	02	07		<i>Belanja Bahan Praktek / Percontohan</i>
5	1	2	02	08		<i>Belanja Bahan Pangan / Pakan</i>
5	1	2	02	09		<i>Belanja Bahan Bibit / Benih Perikanan</i>
5	1	2	02	10		<i>Belanja Bahan PBM / KBM</i>
5	1	2	02	11		<i>Belanja Material Alat Penunjang</i>
5	1	2	01	12		<i>Belanja Bahan Baku Jalan / Jembatan</i>
5	1	2	03			<i>Belanja Jasa Kantor</i>
5	1	2	03	01		<i>Belanja telepon</i>
5	1	2	03	02		<i>Belanja air</i>
5	1	2	03	03		<i>Belanja listrik</i>
5	1	2	03	04		<i>Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang</i>
5	1	2	03	05		<i>Belanja surat kabar/majalah</i>
5	1	2	03	06		<i>Belanja kawat/faksimili/internet</i>
5	1	2	03	07		<i>Belanja paket/pengiriman</i>
5	1	2	03	08		<i>Belanja Sertifikasi</i>
5	1	2	03	09		<i>Belanja Jasa Transaksi Keuangan</i>
5	1	2	03	10		<i>Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum</i>
5	1	2	03	11		<i>Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</i>
5	1	2	03	12		<i>Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi</i>
5	1	2	03	13		<i>Belanja Jasa Pencucian</i>
5	1	2	03	14		<i>Belanja Jasa Pembuangan Sampah/Limbah</i>
5	1	2	03	15		<i>Belanja Jasa Kantor Lainnya</i>
5	1	2	04			<i>Belanja Premi Asuransi</i>
5	1	2	04	01		<i>Belanja Premi Asuransi Kesehatan</i>
5	1	2	04	02		<i>Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah</i>
5	1	2	05			<i>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</i>
5	1	2	05	01		<i>Belanja Jasa Service</i>
5	1	2	05	02		<i>Belanja Penggantian Suku Cadang</i>
5	1	2	05	03		<i>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas</i>

5	1	2	05	04	Belanja Jasa KIR
5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	2	05	06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan
5	1	2	06	01	Belanja cetak
5	1	2	06	02	Belanja Penggandaan
5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5	1	2	07	01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5	1	2	07	04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5	1	2	07	05	Belanja Sewa Gudang
5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5	1	2	08	02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5	1	2	08	03	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
5	1	2	09		Belanja Sewa Alat Berat
5	1	2	09	01	Belanja sewa Eskavator
5	1	2	09	02	Belanja sewa Bulldoser
5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi
5	1	2	10	02	Belanja sewa komputer dan printer
5	1	2	10	03	Belanja sewa proyektor
5	1	2	10	04	Belanja sewa generator
5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda
5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5	1	2	10	07	Belanja Sewa Sound System
5	1	2	10	08	Belanja Sewa Peralatan Kesenian
5	1	2	10	09	Belanja Sewa Peralatan Praktek / Percontohan
5	1	2	10	10	Belanja Sewa Peralatan Studio dan Kelengkapannya

5	1	2	10	11		<i>Belanja Sewa Dekorasi</i>
5	1	2	10	12		<i>Belanja Sewa Air Conditioner (AC)</i>
5	1	2	10	13		<i>Belanja Sewa Pompa Air</i>
5	1	2	10	14		<i>Belanja Sewa Panggung</i>
5	1	2	10	15		<i>Belanja Sewa Televisi</i>
5	1	2	11			<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>
5	1	2	11	01		<i>Belanja makanan dan minuman harian pegawai</i>
5	1	2	11	02		<i>Belanja makanan dan minuman rapat</i>
5	1	2	11	03		<i>Belanja makanan dan minuman tamu</i>
5	1	2	11	04		<i>Belanja makanan dan minuman pelatihan</i>
5	1	2	11	05		<i>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</i>
5	1	2	12			<i>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</i>
5	1	2	12	01		<i>Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH</i>
5	1	2	12	02		<i>Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)</i>
5	1	2	12	03		<i>Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)</i>
5	1	2	12	04		<i>Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)</i>
5	1	2	12	05		<i>Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)</i>
5	1	2	12	06		<i>Belanja Pakaian Dinas Satuan Polisi Pramong Praja</i>
5	1	2	12	07		<i>Belanja Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP)</i>
5	1	2	12	08		<i>Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)</i>
5	1	2	12	09		<i>Belanja Pakaian Linmas / Hansip</i>
5	1	2	12	10		<i>Belanja Kelengkapan Pakaian Dinas</i>
5	1	2	13			<i>Belanja Pakaian Kerja</i>
5	1	2	13	01		<i>Belanja pakaian kerja lapangan</i>
5	1	2	14			<i>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</i>
5	1	2	14	01		<i>Belanja pakaian KORPRI</i>
5	1	2	14	02		<i>Belanja pakaian adat daerah</i>
5	1	2	14	03		<i>Belanja pakaian batik tradisional</i>
5	1	2	14	04		<i>Belanja pakaian olahraga</i>
5	1	2	14	05		<i>Belanja Pakaian Drum Band / Marching Band</i>

5	1	2	14	06		<i>Belanja Pakaian Khusus Peresmian</i>
5	1	2	14	07		<i>Belanja Pakaian Khusus Ibadah</i>
5	1	2	14	08		<i>Belanja Pakaian Khusus Peserta</i>
5	1	2	15			<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>
5	1	2	15	01		<i>Belanja perjalanan dinas dalam daerah</i>
5	1	2	15	02		<i>Belanja perjalanan dinas luar daerah</i>
5	1	2	15	03		<i>Belanja perjalanan dinas luar negeri</i>
5	1	2	16			<i>Belanja Perjalanan Pindah Tugas</i>
5	1	2	16	01		<i>Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah</i>
5	1	2	16	02		<i>Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah</i>
5	1	2	17			<i>Belanja Pemulangan Pegawai</i>
5	1	2	17	01		<i>Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah</i>
5	1	2	17	02		<i>Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah</i>
5	1	2	18			<i>Belanja Pemeliharaan</i>
5	1	2	18	01		<i>Belanja Pemeliharaan Tanah</i>
5	1	2	18	02		<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>
5	1	2	18	03		<i>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>
5	1	2	18	04		<i>Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan</i>
5	1	2	18	05		<i>Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>
5	1	2	19			<i>Belanja Jasa Konsultansi</i>
5	1	2	19	01		<i>Belanja Jasa Konsultansi Penelitian</i>
5	1	2	19	02		<i>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</i>
5	1	2	19	03		<i>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</i>
5	1	2	19	04		<i>Belanja Jasa Konsultansi Advokat/Pengacara</i>
5	1	2	19	05		<i>Belanja Jasa Konsultansi Rekrutmen SDM</i>
5	1	2	19	06		<i>Belanja Jasa Konsultansi Keamanan</i>
5	1	2	19	07		<i>Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer (EO)</i>
5	1	2	19	08		<i>Belanja Jasa Konsultansi Telekomunikasi dan Informasi</i>
5	1	2	20			<i>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</i>

5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5	1	2	21		Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	2	21	01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5	1	2	21	02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5	1	2	22		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	1	2	22	01	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5	1	2	22	02	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5	1	2	22	03	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5	1	2	22	04	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5	1	2	22	05	Belanja Beasiswa Ijin Belajar S1
5	1	2	22	06	Belanja Beasiswa Ijin Belajar S2
5	1	2	23		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
5	1	2	23	02	Belanja sosialisasi
5	1	2	23	03	Belanja bimbingan teknis
5	1	2	24		Belanja Honorarium Non Pegawai
5	1	2	24	01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
5	1	2	24	02	Moderator
5	1	2	25		Honorarium PNS
5	1	2	25	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5	1	2	25	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5	1	2	25	03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	1	2	25	04	Honorarium Pelayanan Kesehatan
5	1	2	26		Honorarium Non PNS
5	1	2	26	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	1	2	26	02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5	1	2	26	03	Honorarium Pejabat Negara
5	1	2	26	04	Honorarium Pegawai Negeri Bukan Sipil
5	1	2	26	05	Honorarium Pelayanan Kesehatan

5	1	2	27			Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5	1	2	27	01		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
5	1	2	27	02		Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
5	1	2	28			Belanja Penjilidan
5	1	2	28	01		Belanja Penjilidan Hard Cover
5	1	2	28	02		Belanja Penjilidan Soft Cover
5	1	2	29			Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS
5	1	2	29	01		Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
5	1	2	29	02		Belanja Sosialisasi
5	1	2	29	03		Belanja Bimbingan Teknis
5	1	2	30			Belanja Jasa Pembongkaran
5	1	2	30	01		Belanja Jasa Pembongkaran Bangunan Gedung
5	1	3				BELANJA BUNGA
5	1	3	01			Bunga Utang Pinjaman
5	1	3	01	01		Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah
5	1	3	01	02		Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	3	01	03		Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank
5	1	3	01	04		Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5	1	3	01	05		Bunga Utang Pinjaman Lainnya
5	1	3	02			Bunga Utang Obligasi
5	1	3	02	01		Bunga Utang Obligasi
5	1	4				BELANJA SUBSIDI
5	1	4	01			Belanja Subsidi
5	1	4	01	01		Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	4	01	02		Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	4	01	03		Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
5	1	5				BELANJA HIBAH
5	1	5	01			Belanja Hibah Kepada Pemerintah
5	1	5	01	01		Belanja Hibah Kepada Pemerintah
5	1	5	01	02		Belanja Hibah Kepada Pemerintah-Instansi Vertikal

5	1	5	02			Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	5	02	01		Hibah kepada Pemerintah Provinsi
5	1	5	02	02		Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
5	1	5	02	03		Hibah kepada Pemerintah Kota
5	1	5	03			Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5	1	5	03	01		Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5	1	5	03	02		dst. ...
5	1	5	04			Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5	1	5	04	01		Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5	1	5	04	02		dst. ...
5	1	5	05			Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5	1	5	05	01		Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5	1	5	05	02		dst. ...
5	1	6				BELANJA BANTUAN SOSIAL
5	1	6	01			Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5	1	6	01	01		Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ..
5	1	6	01	02		Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
5	1	6	02			Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
5	1	6	02	01		Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
5	1	6	02	02		Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
5	2					BELANJA MODAL
5	2	1				Belanja Modal Tanah
5	2	1	01			Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan
5	2	1	01	01		Belanja modal Pengadaan Tanah Kampung
5	2	1	01	02		Belanja modal Pengadaan Tanah Emplasmen
5	2	1	01	03		Belanja modal Pengadaan Tanah Kuburan
5	2	1	01	04		dst.....
5	2	1	02			Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian
5	2	1	02	01		Belanja modal Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
5	2	1	02	02		Belanja modal Pengadaan Tanah Tegalan

5	2	1	02	03		<i>Belanja modal Pengadaan Tanah Ladang</i>
5	2	1	02	04		<i>dst.....</i>
5	2	1	03			<i>Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan</i>
5	2	1	03	01		<i>Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan</i>
5	2	1	03	02		<i>dst.....</i>
5	2	1	04			<i>Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran</i>
5	2	1	04	01		<i>Belanja modal Pengadaan Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan</i>
5	2	1	04	02		<i>Belanja modal Pengadaan Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain</i>
5	2	1	04	03		<i>dst.....</i>
5	2	1	05			<i>Belanja modal Pengadaan Hutan</i>
5	2	1	05	01		<i>Belanja modal Pengadaan Hutan Lebat</i>
5	2	1	05	02		<i>Belanja modal Pengadaan Hutan Belukar</i>
5	2	1	05	03		<i>Belanja modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis</i>
5	2	1	05	04		<i>Belanja modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa</i>
5	2	1	05	05		<i>Belanja modal Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus</i>
5	2	1	05	06		<i>dst.....</i>
5	2	1	06			<i>Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan</i>
5	2	1	06	01		<i>Belanja modal Pengadaan Tambak</i>
5	2	1	06	02		<i>Belanja modal Pengadaan Air Tawar</i>
5	2	1	06	03		<i>dst.....</i>
5	2	1	07			<i>Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa</i>
5	2	1	07	01		<i>Belanja modal Pengadaan tanah Rawa</i>
5	2	1	07	02		<i>Belanja modal Pengadaan tanah Danau</i>
5	2	1	08			<i>Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak</i>
5	2	1	08	01		<i>Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus</i>
5	2	1	08	02		<i>Belanja modal Pengadaan Tanah Rusak</i>
5	2	1	09			<i>Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput</i>
5	2	1	09	01		<i>Belanja modal Pengadaan tanah Alang-alang</i>
5	2	1	09	02		<i>Belanja modal Pengadaan tanah Padang Rumput</i>
5	2	1	10			<i>Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain</i>

5	2	1	10	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain.....
5	2	1	10	02	dst.....
5	2	1	11		Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
5	2	1	11	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal
5	2	1	11	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan / Perusahaan
5	2	1	11	03	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri
5	2	1	11	04	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja / Jasa
5	2	1	11	05	Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong
5	2	1	11	06	Belanja modal Pengadaan Tanah Peternakan
5	2	1	11	07	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan
5	2	1	11	08	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5	2	1	11	09	Belanja modal Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
5	2	1	11	10	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan
5	2	1	11	11	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan
5	2	1	12		Belanja modal Pengadaan Tanah Pertambangan
5	2	1	12	01	Belanja modal Pengadaan Pertambangan
5	2	1	12	02	dst.....
5	2	1	13		Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
5	2	1	13	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5	2	1	13	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5	2	1	13	03	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
5	2	1	13	04	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	2	1	13	05	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	2	1	13	06	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
5	2	1	13	07	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
5	2	1	13	08	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
5	2	1	13	09	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
5	2	1	13	10	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
5	2	1	13	11	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
5	2	1	13	12	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga

5	2	1	13	13		<i>Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah</i>
5	2	1	13	14		<i>dst.....</i>
5	2	2				<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>
5	2	2	01			<i>Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat</i>
5	2	2	01	01		<i>Belanja modal Pengadaan Tractor</i>
5	2	2	01	02		<i>Belanja modal Pengadaan Grader</i>
5	2	2	01	03		<i>Belanja modal Pengadaan Excavator</i>
5	2	2	01	04		<i>Belanja modal Pengadaan Pile Driver</i>
5	2	2	01	05		<i>Belanja modal Pengadaan Hauler</i>
5	2	2	01	06		<i>Belanja modal Pengadaan Asphalt Equipment</i>
5	2	2	01	07		<i>Belanja modal Pengadaan Compacting Equipment</i>
5	2	2	01	08		<i>Belanja modal Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment</i>
5	2	2	01	09		<i>Belanja modal Pengadaan Loader</i>
5	2	2	01	10		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat</i>
5	2	2	01	11		<i>Belanja modal Pengadaan Mesin Proses</i>
5	2	2	01	12		<i>Belanja Modal Pengadaan Stoom Wals</i>
5	2	2	01	13		<i>Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Penyapu Jalan</i>
5	2	2	01	14		<i>Belanja Modal Pengadaan Container</i>
5	2	2	01	15		<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)</i>
5	2	2	01	16		<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Gilas Bergetar</i>
5	2	2	01	17		<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Tamping Rammer</i>
5	2	2	01	18		<i>Belanja Modal Pengadaan Arm Roll</i>
5	2	2	01	19		<i>Belanja Modal Pengadaan Incenerator</i>
5	2	2	02			<i>Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung</i>
5	2	2	02	01		<i>Belanja modal Pengadaan Dredger</i>
5	2	2	02	02		<i>Belanja modal Pengadaan Floating Excavator</i>
5	2	2	02	03		<i>Belanja modal Pengadaan Amphibi Dredger</i>
5	2	2	02	04		<i>Belanja modal Pengadaan Kapal Tarik</i>
5	2	2	02	05		<i>Belanja modal Pengadaan Mesin Proses Apung</i>
5	2	2	02	06		<i>dst.....</i>

5	2	2	03		Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu
5	2	2	03	01	Belanja modal Pengadaan Alat Penarik
5	2	2	03	02	Belanja modal Pengadaan Feeder
5	2	2	03	03	Belanja modal Pengadaan Compressor
5	2	2	03	04	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set
5	2	2	03	05	Belanja modal Pengadaan Pompa
5	2	2	03	06	Belanja modal Pengadaan Mesin Bor
5	2	2	03	07	Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5	2	2	03	08	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
5	2	2	03	09	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
5	2	2	03	10	dst.....
5	2	2	04		Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	2	04	01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	2	2	04	02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5	2	2	04	03	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	2	04	04	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5	2	2	04	05	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	2	2	04	06	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	2	2	05		Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	2	05	01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	2	05	02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
5	2	2	06		Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
5	2	2	06	01	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5	2	2	06	02	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
5	2	2	06	03	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
5	2	2	07		Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
5	2	2	07	01	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
5	2	2	07	02	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5	2	2	07	03	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
5	2	2	08		Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara

5	2	2	08	01	Belanja modal Pengadaan Pesawat Terbang
5	2	2	08	02	dst.....
5	2	2	09		Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
5	2	2	09	01	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5	2	2	09	02	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5	2	2	09	03	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	2	09	04	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5	2	2	09	05	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
5	2	2	09	06	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5	2	2	09	07	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5	2	2	09	08	Belanja modal Pengadaan Peralatan Las
5	2	2	09	09	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es
5	2	2	09	10	dst.....
5	2	2	10		Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	2	10	01	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	2	2	10	02	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	2	10	03	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5	2	2	10	04	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat
5	2	2	10	05	Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
5	2	2	10	06	Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
5	2	2	10	07	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5	2	2	10	08	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5	2	2	10	09	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
5	2	2	10	10	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
5	2	2	10	11	Belanja modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
5	2	2	10	12	dst.....
5	2	2	11		Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
5	2	2	11	01	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal
5	2	2	11	02	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5	2	2	11	03	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian

5	2	2	11	04		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain</i>
5	2	2	11	05		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Calibrasi</i>
5	2	2	11	06		<i>Belanja modal Pengadaan Oscilloscope</i>
5	2	2	11	07		<i>Belanja modal Pengadaan Universal Tester</i>
5	2	2	11	08		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding</i>
5	2	2	11	09		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya</i>
5	2	2	11	10		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora</i>
5	2	2	11	11		<i>Belanja modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa</i>
5	2	2	11	12		<i>Belanja modal Pengadaan Takaran Kering</i>
5	2	2	11	13		<i>Belanja modal Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL</i>
5	2	2	11	14		<i>Belanja modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu</i>
5	2	2	11	15		<i>Belanja modal Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas</i>
5	2	2	11	16		<i>Belanja modal Pengadaan AWRL</i>
5	2	2	11	17		<i>Belanja modal Pengadaan Diamond Core Bit</i>
5	2	2	11	18		<i>Belanja modal Pengadaan Core Drill</i>
5	2	2	11	19		<i>Belanja modal Pengadaan Digital Laser Measure</i>
5	2	2	11	20		<i>dst.....</i>
5	2	2	12			<i>Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan</i>
5	2	2	12	01		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman</i>
5	2	2	12	02		<i>Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan</i>
5	2	2	12	03		<i>Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan</i>
5	2	2	12	04		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian</i>
5	2	2	12	05		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian</i>
5	2	2	12	06		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Processing</i>
5	2	2	12	07		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen</i>
5	2	2	12	08		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan</i>
5	2	2	12	09		<i>dst.....</i>
5	2	2	13			<i>Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan</i>
5	2	2	13	01		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman</i>
5	2	2	13	02		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Panen</i>

5	2	2	13	03	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan</i>
5	2	2	13	04	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium</i>
5	2	2	13	05	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan</i>
5	2	2	13	06	<i>dst.....</i>
5	2	2	14		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kantor</i>
5	2	2	14	01	<i>Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik</i>
5	2	2	14	02	<i>Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah</i>
5	2	2	14	03	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)</i>
5	2	2	14	04	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor</i>
5	2	2	14	05	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya</i>
5	2	2	14	06	<i>dst.....</i>
5	2	2	15		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</i>
5	2	2	15	01	<i>Belanja modal Pengadaan Meubelair</i>
5	2	2	15	02	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu</i>
5	2	2	15	03	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih</i>
5	2	2	15	04	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin</i>
5	2	2	15	05	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Dapur</i>
5	2	2	15	06	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</i>
5	2	2	15	07	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran</i>
5	2	2	15	08	<i>dst.....</i>
5	2	2	16		<i>Belanja modal Pengadaan Komputer</i>
5	2	2	16	01	<i>Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan</i>
5	2	2	16	02	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe</i>
5	2	2	16	03	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer</i>
5	2	2	16	04	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer</i>
5	2	2	16	05	<i>Belanja modal Pengadaan Perlatan Jaringan</i>
5	2	2	16	06	<i>Belanja modal Pengadaan Personal Komputer</i>
5	2	2	17		<i>Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</i>
5	2	2	17	01	<i>Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat</i>
5	2	2	17	02	<i>Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat</i>

5	2	2	17	03	<i>Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat</i>
5	2	2	17	04	<i>Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat</i>
5	2	2	17	05	<i>Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat</i>
5	2	2	17	06	<i>Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat</i>
5	2	2	17	07	<i>Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat</i>
5	2	2	17	08	<i>dst.....</i>
5	2	2	18		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Studio</i>
5	2	2	18	01	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual</i>
5	2	2	18	02	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film</i>
5	2	2	18	03	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A</i>
5	2	2	18	04	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak</i>
5	2	2	18	05	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing</i>
5	2	2	18	06	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur</i>
5	2	2	18	07	<i>dst.....</i>
5	2	2	19		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi</i>
5	2	2	19	01	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone</i>
5	2	2	19	02	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB</i>
5	2	2	19	03	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM</i>
5	2	2	19	04	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF</i>
5	2	2	19	05	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF</i>
5	2	2	19	06	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial</i>
5	2	2	19	07	<i>Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi</i>
5	2	2	19	08	<i>dst.....</i>
5	2	2	20		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar</i>
5	2	2	20	01	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW</i>
5	2	2	20	02	<i>Belanja modal pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW</i>
5	2	2	20	03	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM</i>
5	2	2	20	04	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF</i>
5	2	2	20	05	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF</i>
5	2	2	20	06	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW</i>

5	2	2	20	07		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW</i>
5	2	2	20	08		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM</i>
5	2	2	20	09		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena UHF</i>
5	2	2	20	10		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola</i>
5	2	2	20	11		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF</i>
5	2	2	20	12		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF</i>
5	2	2	20	13		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF</i>
5	2	2	20	14		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF</i>
5	2	2	20	15		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe FPU</i>
5	2	2	20	16		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe Terestrial</i>
5	2	2	20	17		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO</i>
5	2	2	20	18		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Dummy Load</i>
5	2	2	20	19		<i>Belanja modal Pengadaan Switcher Antena</i>
5	2	2	20	20		<i>Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena</i>
5	2	2	20	21		<i>Belanja modal Pengadaan Feeder</i>
5	2	2	20	22		<i>Belanja modal Pengadaan Humidity Control</i>
5	2	2	20	23		<i>Belanja modal Pengadaan Program Input Equipment</i>
5	2	2	20	24		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF</i>
5	2	2	20	25		<i>dst.....</i>
5	2	2	21			<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran</i>
5	2	2	21	01		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum</i>
5	2	2	21	02		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi</i>
5	2	2	21	03		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana</i>
5	2	2	21	04		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata</i>
5	2	2	21	05		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T</i>
5	2	2	21	06		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Rotgen</i>
5	2	2	21	07		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi</i>
5	2	2	21	08		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah</i>
5	2	2	21	09		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan</i>
5	2	2	21	10		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam</i>

5	2	2	21	11		<i>Belanja modal Pengadaan Mortuary</i>
5	2	2	21	12		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak</i>
5	2	2	21	13		<i>Belanja modal Pengadaan Poliklinik Set</i>
5	2	2	21	14		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh</i>
5	2	2	21	15		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)</i>
5	2	2	21	16		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung</i>
5	2	2	21	17		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir</i>
5	2	2	21	18		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi</i>
5	2	2	21	19		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin</i>
5	2	2	21	20		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat</i>
5	2	2	21	21		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa</i>
5	2	2	21	22		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan</i>
5	2	2	21	23		<i>dst.....</i>
5	2	2	22			<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan</i>
5	2	2	22	01		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan</i>
5	2	2	22	02		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis</i>
5	2	2	22	03		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut</i>
5	2	2	22	04		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara</i>
5	2	2	22	05		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian</i>
5	2	2	22	06		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga</i>
5	2	2	22	07		<i>dst.....</i>
5	2	2	23			<i>Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium</i>
5	2	2	23	01		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air</i>
5	2	2	23	02		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi</i>
5	2	2	23	03		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia</i>
5	2	2	23	04		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika</i>
5	2	2	23	05		<i>Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi</i>
5	2	2	23	06		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi</i>
5	2	2	23	07		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia</i>
5	2	2	23	08		<i>Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan</i>

5	2	2	23	09	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Cocok Tanam</i>
5	2	2	23	10	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik</i>
5	2	2	23	11	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A</i>
5	2	2	23	12	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum</i>
5	2	2	23	13	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A</i>
5	2	2	23	14	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran</i>
5	2	2	23	15	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi</i>
5	2	2	23	16	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia</i>
5	2	2	23	17	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A</i>
5	2	2	23	18	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi</i>
5	2	2	23	19	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi</i>
5	2	2	23	20	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi</i>
5	2	2	23	21	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Film</i>
5	2	2	23	22	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan</i>
5	2	2	23	23	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi</i>
5	2	2	23	24	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi</i>
5	2	2	23	25	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika</i>
5	2	2	23	26	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika</i>
5	2	2	23	27	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi</i>
5	2	2	23	28	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan</i>
5	2	2	23	29	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir</i>
5	2	2	23	30	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan</i>
5	2	2	23	31	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola</i>
5	2	2	23	32	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Metalography</i>
5	2	2	23	33	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan</i>
5	2	2	23	34	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan</i>
5	2	2	23	35	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam</i>
5	2	2	23	36	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie</i>
5	2	2	23	37	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam</i>
5	2	2	23	38	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas</i>

5	2	2	23	39		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil</i>
5	2	2	23	40		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel</i>
5	2	2	23	41		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik</i>
5	2	2	23	42		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet</i>
5	2	2	23	43		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik</i>
5	2	2	23	44		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik</i>
5	2	2	23	45		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa</i>
5	2	2	23	46		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian</i>
5	2	2	23	47		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A</i>
5	2	2	23	48		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B</i>
5	2	2	23	49		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya</i>
5	2	2	23	50		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Energi Surya</i>
5	2	2	23	51		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas</i>
5	2	2	23	52		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi</i>
5	2	2	23	53		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan</i>
5	2	2	23	54		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan</i>
5	2	2	23	55		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi</i>
5	2	2	23	56		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika</i>
5	2	2	23	57		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang</i>
5	2	2	23	58		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia</i>
5	2	2	23	59		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri</i>
5	2	2	23	60		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja</i>
5	2	2	23	61		<i>Belanja modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan</i>
5	2	2	23	62		<i>Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis</i>
5	2	2	23	63		<i>Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A</i>
5	2	2	23	64		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya</i>
5	2	2	23	65		<i>dst.....</i>
5	2	2	24			<i>Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah</i>
5	2	2	24	01		<i>Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia</i>
5	2	2	24	02		<i>Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika</i>

5	2	2	24	03	<i>Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar</i>
5	2	2	24	04	<i>Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan</i>
5	2	2	24	05	<i>Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah</i>
5	2	2	24	06	<i>Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas</i>
5	2	2	24	07	<i>Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPS</i>
5	2	2	24	08	<i>Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam</i>
5	2	2	24	09	<i>Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan</i>
5	2	2	24	10	<i>Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian</i>
5	2	2	24	11	<i>Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga</i>
5	2	2	24	12	<i>Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : PMP</i>
5	2	2	24	13	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan / Keterampilan Lain-lain</i>
5	2	2	24	14	<i>dst.....</i>
5	2	2	25		<i>Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir</i>
5	2	2	25	01	<i>Belanja modal Pengadaan Analytical instrument</i>
5	2	2	25	02	<i>Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor</i>
5	2	2	25	03	<i>Belanja modal Pengadaan General Laboratory Tool</i>
5	2	2	25	04	<i>Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor A</i>
5	2	2	25	05	<i>Belanja modal Pengadaan Glassware Plastic/Utensils</i>
5	2	2	25	06	<i>Belanja modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment</i>
5	2	2	25	07	<i>dst.....</i>
5	2	2	26		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika</i>
5	2	2	26	01	<i>Belanja modal Pengadaan Radiation Detector</i>
5	2	2	26	02	<i>Belanja modal Pengadaan Modular Counting and Scentific</i>
5	2	2	26	03	<i>Belanja modal Pengadaan Assembly/Accounting System</i>
5	2	2	26	04	<i>Belanja modal Pengadaan Recorder Display</i>
5	2	2	26	05	<i>Belanja modal Pengadaan System/Power Supply</i>
5	2	2	26	06	<i>Belanja modal Pengadaan Measuring / Testing Device</i>
5	2	2	26	07	<i>Belanja modal Pengadaan Opto Electronics</i>
5	2	2	26	08	<i>Belanja modal Pengadaan Accelator</i>
5	2	2	26	09	<i>Belanja modal Pengadaan Reactor Expermental System</i>

5	2	2	26	10	dst.....
5	2	2	27		Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
5	2	2	27	01	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
5	2	2	27	02	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
5	2	2	27	03	Belanja modal Pengadaan Proteksi Lingkungan
5	2	2	27	04	Belanja modal Pengadaan Meteorological Equipment
5	2	2	27	05	Belanja modal Pengadaan Sumber Radiasi
5	2	2	27	06	dst.....
5	2	2	28		Belanja modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
5	2	2	28	01	Belanja modal Pengadaan Radiation Application Equipment
5	2	2	28	02	Belanja modal Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device
5	2	2	28	03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
5	2	2	28	04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Hidrologi
5	2	2	28	05	dst.....
5	2	2	29		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5	2	2	29	01	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
5	2	2	29	02	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	2	2	29	03	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	2	2	29	04	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5	2	2	29	05	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
5	2	2	29	06	dst.....
5	2	2	30		Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
5	2	2	30	01	Belanja modal Pengadaan Towing Carriage
5	2	2	30	02	Belanja modal Pengadaan Wave Generator and Absorber
5	2	2	30	03	Belanja modal Pengadaan Data Acquisition and Analyzing System
5	2	2	30	04	Belanja modal Pengadaan Cavitation Tunnel
5	2	2	30	05	Belanja modal Pengadaan Overhead Cranes
5	2	2	30	06	Belanja modal Pengadaan Peralatan umum
5	2	2	30	07	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop
5	2	2	30	08	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop

5	2	2	30	09		<i>Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop</i>
5	2	2	30	10		<i>Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop</i>
5	2	2	30	11		<i>Belanja modal Pengadaan Pemesinan Painting Shop</i>
5	2	2	30	12		<i>Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop</i>
5	2	2	30	13		<i>Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop</i>
5	2	2	30	14		<i>Belanja modal Pengadaan MOB</i>
5	2	2	30	15		<i>Belanja modal Pengadaan Photo and Film Equipment</i>
5	2	2	30	16		<i>dst.....</i>
5	2	2	31			<i>Belanja modal Pengadaan Senjata Api</i>
5	2	2	31	01		<i>Belanja modal Pengadaan Senjata Genggam</i>
5	2	2	31	02		<i>Belanja modal Senjata Pinggang</i>
5	2	2	31	03		<i>Belanja modal Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang</i>
5	2	2	31	04		<i>Belanja modal Senapan Mesin</i>
5	2	2	31	05		<i>Belanja modal Mortir</i>
5	2	2	31	06		<i>Belanja modal Anti Lapis Baja</i>
5	2	2	31	07		<i>Belanja modal Artileri Medan (Armed)</i>
5	2	2	31	08		<i>Belanja modal Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)</i>
5	2	2	31	09		<i>Belanja modal Peluru Kendali/Rudal</i>
5	2	2	31	10		<i>Belanja modal Kavaleri</i>
5	2	2	31	11		<i>Belanja modal Senjata Lain-lain</i>
5	2	2	32			<i>Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api</i>
5	2	2	32	01		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan</i>
5	2	2	32	02		<i>Belanja modal Pengadaan Non Senjata Api</i>
5	2	2	33			<i>Belanja modal Pengadaan Amunisi</i>
5	2	2	33	01		<i>Belanja modal Pengadaan Amunisi Umum</i>
5	2	2	33	02		<i>Belanja modal Pengadaan Amunisi Darat</i>
5	2	2	34			<i>Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar</i>
5	2	2	34	01		<i>Belanja modal Pengadaan Laser</i>
5	2	2	34	02		<i>dst.....</i>
5	2	2	35			<i>Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan</i>

5	2	2	35	01	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan</i>
5	2	2	35	02	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan</i>
5	2	2	35	03	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air</i>
5	2	2	36		<i>Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</i>
5	2	2	36	01	<i>Belanja modal Pengadaan Sarana Perlengkapan Kerja</i>
5	2	2	37		<i>Belanja modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota</i>
5	2	2	37	01	<i>Belanja modal Pengadaan Sarana Penerangan Jalan</i>
5	2	2	37	02	<i>Belanja modal Pengadaan Sarana Penerangan Taman</i>
5	2	2	37	03	<i>Belanja modal Pengadaan Sarana Penerang Hutan Kota</i>
5	2	2	38		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>
5	2	2	38	01	<i>Belanja modal Pengadaan Sarana Peralatan Gedung Kantor</i>
5	2	2	39		<i>Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>
5	2	2	39	01	<i>Belanja modal Pengadaan Sarana Perlengkapan Gedung Kantor</i>
5	2	2	40		<i>Belanja modal Pengadaan Alat-alat Perindustrian</i>
5	2	2	40	01	<i>Belanja modal Pengadaan Mesin Industri</i>
5	2	2	40	02	<i>Belanja modal Pengadaan Alat-alat Industri</i>
5	2	2	41		<i>Belanja modal Pengadaan Marka Jalan dan Kelengkapannya</i>
5	2	2	41	01	<i>Belanja modal Pengadaan Sarana Marka Jalan</i>
5	2	2	41	02	<i>Belanja modal Pengadaan Prasarana Marka Jalan</i>
5	2	2	42		<i>Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Kendaraan Bermotor</i>
5	2	2	42	01	<i>Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Interior Kendaraan Bermotor</i>
5	2	2	42	02	<i>Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Eksterior Kendaraan Bermotor</i>
5	2	2	43		<i>Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pertamanan dan Kebersihan</i>
5	2	2	43	01	<i>Belanja modal Pengadaan Sarana Pertamanan</i>
5	2	2	43	02	<i>Belanja modal Pengadaan Sarana Kebersihan</i>
5	2	2	44		<i>Belanja modal Pengadaan Nama Jalan</i>
5	2	2	44	01	<i>Belanja modal Pengadaan Nama Jalan Protokol</i>
5	2	2	44	02	<i>Belanja modal Pengadaan Nama Jalan Lingkungan</i>
5	2	2	45		<i>Belanja modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB</i>
5	2	2	45	01	<i>Belanja modal Pengadaan Sarana Penyuluhan KB</i>

5	2	2	45	02		<i>Belanja modal Pengadaan Prasarana Penyuluh KB</i>
5	2	2	46			<i>Belanja modal Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)</i>
5	2	2	46	01		<i>Belanja modal Pengadaan Sarana Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas</i>
5	2	2	47			<i>Belanja modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana</i>
5	2	2	47	01		<i>Belanja modal Pengadaan Sarana Penanganan Bencana</i>
5	2	2	47	02		<i>Belanja modal Pengadaan Prasarana Penanganan Bencana</i>
5	2	2	48			<i>Belanja modal Pengadaan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor</i>
5	2	2	48	01		<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor</i>
5	2	2	48	02		<i>Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor</i>
5	2	3				<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>
5	2	3	01			<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</i>
5	2	3	01	01		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor</i>
5	2	3	01	02		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang</i>
5	2	3	01	03		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel</i>
5	2	3	01	04		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi</i>
5	2	3	01	05		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium</i>
5	2	3	01	06		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan</i>
5	2	3	01	07		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opsevatorium</i>
5	2	3	01	08		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah</i>
5	2	3	01	09		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</i>
5	2	3	01	10		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan</i>
5	2	3	01	11		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga</i>
5	2	3	01	12		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar</i>
5	2	3	01	13		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga</i>
5	2	3	01	14		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool</i>
5	2	3	01	15		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan</i>
5	2	3	01	16		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik</i>
5	2	3	01	17		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus</i>
5	2	3	01	18		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak</i>
5	2	3	01	19		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan</i>

5	2	3	01	20	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5	2	3	01	21	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5	2	3	01	22	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
5	2	3	01	23	Belanja modal Pengadaan Bangunan Lembaga Masyarakat
5	2	3	01	24	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5	2	3	01	25	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium
5	2	3	01	26	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	2	3	01	27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	2	3	02		Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	3	02	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5	2	3	02	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
5	2	3	02	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III
5	2	3	02	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan
5	2	3	02	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama
5	2	3	02	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Hotel
5	2	3	02	07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Motel
5	2	3	02	08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
5	2	3	02	09	dst.....
5	2	3	03		Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara
5	2	3	03	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
5	2	3	03	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5	2	3	03	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi
5	2	3	03	04	dst.....
5	2	3	04		Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5	2	3	04	01	Belanja modal Pengadaan Istana Peringatan
5	2	3	04	02	Belanja modal Pengadaan Rumah Adat
5	2	3	04	03	Belanja modal Pengadaan Rumah Peninggalan Sejarah
5	2	3	04	04	Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah
5	2	3	04	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5	2	3	04	06	dst.....

5	2	3	05		Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	2	3	05	01	Belanja modal Pengadaan Tugu Kemerdekaan
5	2	3	05	02	Belanja modal Pengadaan Tugu Pembangunan
5	2	3	05	03	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya
5	2	3	06		Belanja modal Pengadaan Candi
5	2	3	06	01	Belanja modal Pengadaan Candi Hindhu
5	2	3	06	02	Belanja modal Pengadaan Candi Budha
5	2	3	06	03	Belanja modal Pengadaan Candi Lainnya
5	2	3	07		Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah
5	2	3	07	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya
5	2	3	09		Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	3	09	01	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas
5	2	3	09	02	dst.....
5	2	3	10		Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
5	2	3	10	01	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5	2	3	10	02	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
5	2	3	10	03	dst.....
5	2	3	11		Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5	2	3	11	01	Belanja modal Pengadaan Rumwey/Threshold Light
5	2	3	11	02	Belanja modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5	2	3	11	03	Belanja modal Pengadaan Approach Light
5	2	3	11	04	Belanja modal Pengadaan Rumwey Identification Light (Rells)
5	2	3	11	05	Belanja modal Pengadaan Signal
5	2	3	11	06	Belanja modal Pengadaan Flood Light
5	2	3	11	07	dst.....
5	2	4			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5	2	4	01		Belanja modal Pengadaan Jalan
5	2	4	01	01	Belanja modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional
5	2	4	01	02	Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi
5	2	4	01	03	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

5	2	4	01	04		<i>Belanja modal Pengadaan Jalan Desa</i>
5	2	4	01	05		<i>Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus</i>
5	2	4	01	06		<i>Belanja modal Pengadaan Jalan Tol</i>
5	2	4	01	07		<i>Belanja modal Pengadaan Jalan Kereta</i>
5	2	4	01	08		<i>Belanja modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang</i>
5	2	4	01	09		<i>dst.....</i>
5	2	4	02			<i>Belanja modal Pengadaan Jembatan</i>
5	2	4	02	01		<i>Belanja modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional</i>
5	2	4	02	02		<i>Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi</i>
5	2	4	02	03		<i>Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota</i>
5	2	4	02	04		<i>Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa</i>
5	2	4	02	05		<i>Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus</i>
5	2	4	02	06		<i>Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol</i>
5	2	4	02	07		<i>Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api</i>
5	2	4	02	08		<i>Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang</i>
5	2	4	02	09		<i>Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan</i>
5	2	4	02	10		<i>dst.....</i>
5	2	4	03			<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi</i>
5	2	4	03	01		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk</i>
5	2	4	03	02		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi</i>
5	2	4	03	03		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi</i>
5	2	4	03	04		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi</i>
5	2	4	03	05		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi</i>
5	2	4	03	06		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi</i>
5	2	4	03	07		<i>dst.....</i>
5	2	4	04			<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut</i>
5	2	4	04	01		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk</i>
5	2	4	04	02		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut</i>
5	2	4	04	03		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut</i>
5	2	4	04	04		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut</i>

5	2	4	04	05		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut</i>
5	2	4	04	06		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut</i>
5	2	4	04	07		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut</i>
5	2	4	04	08		<i>dst.....</i>
5	2	4	05			<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa</i>
5	2	4	05	01		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder</i>
5	2	4	05	02		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa</i>
5	2	4	05	03		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa</i>
5	2	4	05	04		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa</i>
5	2	4	05	05		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut</i>
5	2	4	05	06		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa</i>
5	2	4	05	07		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa</i>
5	2	4	05	08		<i>dst.....</i>
5	2	4	06			<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam</i>
5	2	4	06	01		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai</i>
5	2	4	06	02		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai</i>
5	2	4	06	03		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman</i>
5	2	4	06	04		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai</i>
5	2	4	06	05		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai</i>
5	2	4	06	06		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai</i>
5	2	4	06	07		<i>dst.....</i>
5	2	4	07			<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah</i>
5	2	4	07	01		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air</i>
5	2	4	07	02		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air</i>
5	2	4	07	03		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air</i>
5	2	4	07	04		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air</i>
5	2	4	07	05		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air</i>
5	2	4	07	06		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air</i>
5	2	4	07	07		<i>dst.....</i>
5	2	4	08			<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku</i>

5	2	4	08	01	<i>Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku</i>
5	2	4	08	02	<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku</i>
5	2	4	08	03	<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih</i>
5	2	4	08	04	<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku</i>
5	2	4	08	05	<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku</i>
5	2	4	08	06	<i>dst.....</i>
5	2	4	09		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor</i>
5	2	4	09	01	<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor</i>
5	2	4	09	02	<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor</i>
5	2	4	09	03	<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor</i>
5	2	4	09	04	<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor</i>
5	2	4	09	05	<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor</i>
5	2	4	09	06	<i>dst.....</i>
5	2	4	10		<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air</i>
5	2	4	10	01	<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut</i>
5	2	4	10	02	<i>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar</i>
5	2	4	10	03	<i>dst.....</i>
5	2	4	11		<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih</i>
5	2	4	11	01	<i>Belanja modal Pengadaan Air Muka Tanah</i>
5	2	4	11	02	<i>Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air</i>
5	2	4	11	03	<i>Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam</i>
5	2	4	11	04	<i>Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal</i>
5	2	4	11	05	<i>Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya</i>
5	2	4	11	06	<i>dst.....</i>
5	2	4	12		<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor</i>
5	2	4	12	01	<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor</i>
5	2	4	12	02	<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri</i>
5	2	4	12	03	<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian</i>
5	2	4	12	04	<i>dst.....</i>
5	2	4	13		<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik</i>

5	2	4	13	01		<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik</i>
5	2	4	13	02		<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik</i>
5	2	4	14			<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan</i>
5	2	4	14	01		<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan</i>
5	2	4	15			<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik</i>
5	2	4	15	01		<i>Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air</i>
5	2	4	15	02		<i>Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel</i>
5	2	4	15	03		<i>Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)</i>
5	2	4	15	04		<i>Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)</i>
5	2	4	15	05		<i>Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)</i>
5	2	4	15	06		<i>Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)</i>
5	2	4	15	07		<i>Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)</i>
5	2	4	15	08		<i>Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)</i>
5	2	4	15	09		<i>Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)</i>
5	2	4	15	10		<i>Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)</i>
5	2	4	15	11		<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)</i>
5	2	4	15	12		<i>dst.....</i>
5	2	4	16			<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik</i>
5	2	4	16	01		<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk</i>
5	2	4	16	02		<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi</i>
5	2	4	16	03		<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik</i>
5	2	4	16	04		<i>dst.....</i>
5	2	4	17			<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan</i>
5	2	4	17	01		<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat</i>
5	2	4	17	02		<i>dst.....</i>
5	2	4	18			<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas</i>
5	2	4	18	01		<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Gas</i>
5	2	4	18	02		<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas</i>
5	2	4	18	03		<i>dst.....</i>
5	2	4	19			<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman</i>

5	2	4	19	01		<i>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir</i>
5	2	4	19	02		<i>dst.....</i>
5	2	4	20			<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum</i>
5	2	4	20	01		<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa</i>
5	2	4	20	02		<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi</i>
5	2	4	20	03		<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi</i>
5	2	4	20	04		<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah</i>
5	2	4	20	05		<i>dst.....</i>
5	2	4	21			<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik</i>
5	2	4	21	01		<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi</i>
5	2	4	21	02		<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi</i>
5	2	4	22			<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon</i>
5	2	4	22	01		<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah</i>
5	2	4	22	02		<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah</i>
5	2	4	22	03		<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air</i>
5	2	4	23			<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas</i>
5	2	4	23	01		<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi</i>
5	2	4	23	02		<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi</i>
5	2	4	23	03		<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Dinas</i>
5	2	4	23	04		<i>Belanja modal Pengadaan Jaringan BBM</i>
5	2	4	23	05		<i>dst.....</i>
5	2	5				<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>
5	2	5	01			<i>Belanja modal Pengadaan Buku</i>
5	2	5	01	01		<i>Belanja modal Pengadaan Umum</i>
5	2	5	01	02		<i>Belanja modal Pengadaan Filsafat</i>
5	2	5	01	03		<i>Belanja modal Pengadaan Agama</i>
5	2	5	01	04		<i>Belanja modal Pengadaan Ilmu Sosial</i>
5	2	5	01	05		<i>Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa</i>
5	2	5	01	06		<i>Belanja modal Pengadaan Matematika & Pengetahuan alam</i>
5	2	5	01	07		<i>Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis</i>

5	2	5	01	08	Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah raga
5	2	5	01	09	Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
5	2	5	01	10	Dst...
5	2	5	02		Belanja modal Pengadaan Terbitan
5	2	5	02	01	Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala
5	2	5	02	02	Belanja modal Pengadaan Buku Laporan
5	2	5	02	03	dst.....
5	2	5	03		Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
5	2	5	03	01	Belanja modal Pengadaan Peta
5	2	5	03	02	Belanja modal Pengadaan Naskah (Manuskrip)
5	2	5	03	03	Belanja modal Pengadaan Musik
5	2	5	03	04	Belanja modal Pengadaan Karya Grafika (Graphic Material)
5	2	5	03	05	Belanja modal Pengadaan Three Dimensional Artetacs and Realita
5	2	5	03	06	Belanja modal Pengadaan Bentuk Micro (Microform)
5	2	5	03	07	Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara
5	2	5	03	08	Belanja modal Pengadaan Berkas Komputer (Computer Files)
5	2	5	03	09	Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video
5	2	5	03	10	Belanja modal Pengadaan Tarscalt
5	2	5	03	11	dst.....
5	2	5	04		Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5	2	5	04	01	Belanja modal Pengadaan Pahatan
5	2	5	04	02	Belanja modal Pengadaan Lukisan
5	2	5	04	03	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian
5	2	5	04	04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga
5	2	5	04	05	Belanja modal Pengadaan Tanda Penghargaan
5	2	5	04	06	Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen
5	2	5	04	07	Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah
5	2	5	04	08	Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan
5	2	5	04	09	dst.....
5	2	5	05		Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

5	2	5	05	01		<i>Belanja modal Pengadaan Senam</i>
5	2	5	05	02		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Air</i>
5	2	5	05	03		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara</i>
5	2	5	05	04		<i>Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya</i>
5	2	5	05	05		<i>dst.....</i>
5	2	5	06			<i>Belanja modal Pengadaan Hewan</i>
5	2	5	06	01		<i>Belanja modal Pengadaan Binatang Ternak</i>
5	2	5	06	02		<i>Belanja modal Pengadaan Binatang Unggas</i>
5	2	5	06	03		<i>Belanja modal Pengadaan Binatang Melata</i>
5	2	5	06	04		<i>Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan</i>
5	2	5	06	05		<i>Belanja modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang</i>
5	2	5	06	06		<i>Belanja modal Pengadaan Hewan Pengamanan</i>
5	2	5	06	07		<i>dst.....</i>
5	2	5	07			<i>Belanja modal Pengadaan Tanaman</i>
5	2	5	07	01		<i>Belanja modal Pengadaan Tanaman Perkebunan</i>
5	2	5	07	02		<i>Belanja modal Pengadaan Tanaman Holtikultura</i>
5	2	5	07	03		<i>Belanja modal Pengadaan Tanaman Kehutanan</i>
5	2	5	07	04		<i>Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias</i>
5	2	5	07	05		<i>Belanja modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika</i>
5	2	5	07	06		<i>dst.....</i>
5	3					<i>BELANJA TAK TERDUGA</i>
5	3	1				<i>Belanja Tak Terduga</i>
5	3	1	01			<i>Belanja Tak Terduga</i>
5	3	1	01	01		<i>Belanja Tak Terduga</i>
6						<i>TRANSFER</i>
6	1					<i>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</i>
6	1	1				<i>Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</i>
6	1	1	01			<i>Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota</i>
6	1	1	01	01		<i>Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota</i>
6	1	1	01	02		<i>dst.....</i>

6	1	2				Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6	1	2	01			Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6	1	2	01	01		Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6	1	2	01	02		dst.....
6	2					TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6	2	1				Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	1	01			Bantuan Keuangan ke Propinsi
6	2	1	01	01		Bantuan Keuangan ke Propinsi
6	2	1	01	02		dst.....
6	2	1	02			Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6	2	1	02	01		Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6	2	1	02	02		dst.....
6	2	2				Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	2	01			Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	2	01	01		Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	2	01	02		dst.....
6	2	3				Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6	2	3	01			Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
6	2	3	01	01		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
6	2	3	01	02		dst.....
6	2	4				Transfer Dana Otonomi Khusus
6	2	4	01			Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
6	2	4	01	01		Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
6	2	4	01	02		dst.....

C. Koding Pembiayaan dalam Dokumen Anggaran

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	6	7	8	9	
7					PEMBIAYAAN
7	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7	1	1			Penggunaan SiLPA
7	1	1	01		Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
7	1	1	01	01	<i>Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya</i>
7	1	2			Pencairan Dana Cadangan
7	1	2	01		Pencairan Dana Cadangan
7	1	2	01	01	<i>Pencairan Dana Cadangan</i>
7	1	2	01	02	<i>dst.....</i>
7	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7	1	3	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7	1	2	01	01	<i>Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN</i>
7	1	2	01	02	<i>Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD</i>
7	1	2	01	03	<i>Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta</i>
7	1	4			Pinjaman Dalam Negeri
7	1	4	01		Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7	1	4	01	01	<i>Pinjaman Dalam Negeri dari Bank</i>
7	1	4	01	02	<i>dst.....</i>
7	1	4	02		Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	1	4	02	01	<i>Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>

7	1	4	03			Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7	1	4	03	01		Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7	1	4	04			Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7	1	4	04	01		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7	1	4	05			Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7	1	4	05	01		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7	1	4	06			Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	1	4	06	01		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	1	5				Penerimaan Kembali Piutang
7	1	5	01			Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7	1	5	01	01		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7	1	5	02			Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7	1	5	02	01		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7	1	5	03			Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7	1	5	03	01		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7	1	5	04			Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	1	5	04	01		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	1	5	05			Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7	1	5	05	01		Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7	1	6				Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7	1	6	01			Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	1	6	01	01		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	1	6	02			Penarikan Dana Bergulir
7	1	6	02	01		Penarikan Dana Bergulir
7	1	6	03			Pencairan Deposito Jangka Panjang
7	1	6	03	01		Pencairan Deposito Jangka Panjang
7	1	6	04			Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7	1	6	04	01		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7	1	7				Pinjaman Luar Negeri
7	1	7	01			Pinjaman Luar Negeri

7	1	7	01	01		<i>Pinjaman Luar Negeri</i>
7	1	8				<i>Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya</i>
7	1	8	01			<i>Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya</i>
7	1	8	01	01		<i>Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya</i>
7	2					<i>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</i>
7	2	1				<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>
7	2	1	01			<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>
7	2	1	01	01		<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>
7	2	2				<i>Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah</i>
7	2	2	01			<i>Penyertaan Modal pada BUMN</i>
7	2	2	01	01		<i>Penyertaan Modal pada BUMN</i>
7	2	2	02			<i>Penyertaan Modal pada BUMD</i>
7	2	2	02	01		<i>Penyertaan Modal pada BUMD</i>
7	2	2	03			<i>Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta</i>
7	2	2	03	01		<i>Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta</i>
7	2	3				<i>Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri</i>
7	2	3	01			<i>Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank</i>
7	2	3	01	01		<i>Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank</i>
7	2	3	02			<i>Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>
7	2	3	02	01		<i>Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>
7	2	3	03			<i>Pelunasan Obligasi Daerah</i>
7	2	3	03	01		<i>Pelunasan Obligasi Daerah</i>
7	2	3	04			<i>Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat</i>
7	2	3	04	01		<i>Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat</i>
7	2	3	05			<i>Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya</i>
7	2	3	05	01		<i>Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya</i>
7	2	3	06			<i>Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota</i>
7	2	3	06	01		<i>Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota</i>
7	2	4				<i>Pemberian Pinjaman Daerah</i>
7	2	4	01			<i>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara</i>

7	2	4	01	01		<i>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara</i>
7	2	4	02			<i>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah</i>
7	2	4	02	01		<i>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah</i>
7	2	4	03			<i>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat</i>
7	2	4	03	01		<i>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat</i>
7	2	4	04			<i>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya</i>
7	2	4	04	01		<i>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya</i>
7	2	5				<i>Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya</i>
7	2	5	01			<i>Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan</i>
7	2	5	01	01		<i>Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan</i>
7	2	5	02			<i>Pembentukan Dana Bergulir</i>
7	2	5	02	01		<i>Pembentukan Dana Bergulir</i>
7	2	5	03			<i>Pembentukan Deposito Jangka Panjang</i>
7	2	5	03	01		<i>Pembentukan Deposito Jangka Panjang</i>
7	2	5	04			<i>Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya</i>
7	2	5	04	01		<i>Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya</i>
7	2	6				<i>Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri</i>
7	2	6	01			<i>Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri</i>
7	2	6	01	01		<i>Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri</i>
7	2	7				<i>Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya</i>
7	2	7	01			<i>Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya</i>
7	2	7	01	01		<i>Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya</i>

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

